

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ATAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA LAZIS WAHDAH

Taufiq Rahman (1492140001)

Jurusan Akuntansi

Universitas Negeri Makassar

Pembimbing I: Sammsinar, S.Pd.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.

Pembimbing II: Masnawaty Sangkala, S.E.,M.Si.,Ph.D.,Ak.,CA.,CPA

Ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 atas pengungkapan laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Lazis Wahdah, sedangkan sampel adalah laporan keuangan Lazis Wahdah tahun 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan Lazis Wahdah pada tahun 2017 tidak sesuai dengan PSAK 109 karena tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat hal ini dapat dilihat dalam penyajian laporan keuangan Lazis Wahdah pada tahun 2017 masih menggunakan format dari BAZNAS yaitu sistem pencatatan single entry sehingga hanya menghasilkan tiga komponen laporan keuangan amil dan belum menghasilkan lima komponen laporan keuangan amil menurut PSAK 109.

Kata Kunci : PSAK 109, Zakat dan Infak/Sedekah, Pengungkapan, Laporan Keuangan

Summary. This study aims to determine the application of PSAK 109 to the disclosure of financial statements. The population of this study is Lazis Wahdah's annual financial report, while the sample is the 2017 Lazis Wahdah financial report. Data collection is done using documentation and interview techniques. This research is a qualitative descriptive study.

The results of this study indicate that the disclosure of financial statements conducted by Lazis Wahdah in 2017 is not in accordance with PSAK 109 because the absence of notes to the financial statements made this can be seen in the presentation of Lazis Wahdah's financial statements in 2017 still using the format of BAZNAS namely recording system single entry so that it only produces three components of the amil financial report and has not produced five components of the amil financial report according to PSAK 109.

Keywords: PSAK 109, Zakat and Infaq / Alms, Disclosures, Financial Reports

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab, yang mana peruntukannya untuk para *mustahik* (penerima zakat) yang berfungsi sebagai penyucian dari harta itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan wujud ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Taala* karena taat terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh-Nya dan merupakan unsur kedermawanan

dari kaum muslimin yang di berikan rezeki lebih oleh Allah dengan mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan saudara-saudaranya yang kurang mampu.

Kedudukan zakat dalam Islam sangat penting, hal ini bisa dilihat dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perintah untuk mengeluarkan zakat. Allah *Subhanahu Wa Taala* berfirman : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi

mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (TQS. At-Taubah (9) : 103). Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR. Bukhari No. 1308).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS,2015). Melihat kondisi ini maka secara otomatis Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah *muzakki* dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen *muzakki* yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). Ketiga, riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS, IPB, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 mencapai sebesar Rp 217 triliun. Namun potensi zakat yang bisa terserap menurut BAZNAS, baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja.

Pelaksanaan zakat dikalangan kaum muslimin Indonesia sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama Islam. Namun hanya zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat maal yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian. Rendahnya tingkat kolektabilitas dana zakat di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi

karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Untuk mengatur kedua kendala dalam pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP No 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat Islam.

Oleh karena itu, agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat pada masyarakat (umat), dan (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima.

Untuk mengatur pengelolaan zakat agar lebih terarah maka pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 yang memberikan legitimasi bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat maka perlu dibentuk badan/lembaga pengelola zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara independen. Sebelumnya aturan tentang zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 hingga dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat bagi mustahik.

Undang-Undang zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Sebagai salah satu organisasi pengabdian masyarakat organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah sudah seharusnya membuat pembukuan untuk dana yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik dan benar. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga tujuan akuntansi syariah itu dapat terpenuhi.

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholder*, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada masyarakat (umat), untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi zakat merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (umat). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat (umat).

Sejak tahun 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, dan mulai

berlaku efektif pada 1 Januari 2012. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Selain itu, penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, menjadi penting bagi organisasi pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum menerapkan akuntansi zakat, sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 109. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Permasalahan ini muncul karena tidak semua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Fenomena tersebut merupakan alasan untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian sebelumnya, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Adapun judul dalam penelitian ini adalah : “Analisis Penerapan PSAK 109 Atas Pengungkapan Laporan Keuangan pada LAZIS Wahdah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta yang bersifat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Sedangkan Infak/sedekah adalah harta yang dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala dan ridha Allah *Subhanahu Wa Taala* semata yang bersifat sunnah dan tidak dibatasi jumlah maupun waktunya penyalurannya. (Nurhayati & Wasilah, 2014: 284)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan istilah lain dari amil zakat. Bedanya, jika amil zakat dapat dibentuk oleh perorangan, OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. OPZ merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Amil zakat adalah salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Laporan Keuangan Amil

Dalam PSAK 109 komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap terdiri dari :

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Konsep Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mahmudi, 2008)

Pengungkapan berdasarkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan. Catatan atas laporan keuangan ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan.

Pengungkapan dalam PSAK 109 terdapat pada paragraf 39, paragraf 40 dan paragraf 41.

Zakat

39. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti

- persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Infak/Sedekah

40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4) diungkapkan secara terpisah;

- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (i) sifat hubungan istimewa;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

41. Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan topik penelitian, maka yang menjadi variabel penelitian ini yaitu Penerapan PSAK 109 Atas Pengungkapan Laporan Keuangan.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Wahdah (Lazis Wahdah). Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan tahunan Lazis Wahdah. Sampel dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Lazis Wahdah tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat

tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian dibandingkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang telah dipelajari kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah atas pengungkapan laporan keuangan pada Lazis Wahdah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak /sedekah atas pengungkapan laporan keuangan yang diterapkan pada Lazis Wahdah dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah atas pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Data yang telah diperoleh diolah dengan langkah-langkah:

- (a) Mengumpulkan data keuangan Lazis Wahdah, kemudian data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian.
- (b) Data diolah sesuai dengan masalah penelitian kemudian dibandingkan dengan PSAK 109.
- (c) Analisa data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban terhadap masalah, kemudian membuat kesimpulan tentang penerapan PSAK 109 yang dilakukan Lazis Wahdah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap lembaga amal zakat wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah serta dana sosial lainnya kepada muzakki. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Dana yang terkumpul tersebut berasal dari muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana zakat yang

dikelola secara wajar, periodik dan transparan.

Praktik pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh Lazis Wahdah yaitu membuat laporan keuangan secara periodik setiap satu periode. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Saiful (Bendahara Umum Lazis Wahdah) pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “Lazis Wahdah membuat laporan keuangan secara periodik dalam satu periode berupa laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan bulanan menggunakan dua format yaitu data penerimaan keseluruhan dan data penyaluran. Laporan bulanan dan laporan semester akan dipublikasikan di media cetak seperti majalah. Sedangkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal akan dipublikasikan di media cetak seperti koran ataupun majalah. Dalam mempublikasikan laporan keuangannya Lazis Wahdah juga menggunakan media online seperti website, media sosial dan media elektronik lainnya. Dalam menyusun laporan keuangannya Lazis Wahdah mengacu pada format dari BAZNAS.”

Komponen laporan keuangan amal yang telah dibuat Lazis Wahdah belum sepenuhnya mengacu kepada PSAK 109, komponen laporan keuangan yang belum dibuat oleh Lazis Wahdah yaitu: laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “Laporan keuangan yang dibuat Lazis Wahdah pada tahun 2017 masih menggunakan format single entry yang mana hanya menghasilkan laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah. Meskipun demikian, pada tahun 2017 Lazis Wahdah sudah membuat tiga laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Kerangka format yang sesuai dengan PSAK 109 juga sudah ada pada tahun 2017 namun baru bisa digunakan pada tahun 2018. Sejak Januari 2018 Lazis Wahdah telah menggunakan PSAK 109 dan masih dalam tahap

pembenahan sistem, dan sudah menggunakan sistem komputerisasi informasi. Menurut BPK internal masih harus diperbaiki. Formatnya sudah sesuai dengan apa yang di buat oleh BAZNAS. Meskipun demikian pada tahun 2018 belum bisa sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala awal masih belum memahami penerapan PSAK 109 secara utuh. Pada saat Lazis Wahdah diminta untuk membuat laporan konsolidasi nasional belum bisa serta merta menyesuaikan dengan PSAK 109, PSAK 109 merupakan format untuk pelaporannya sementara dalam penyajian PSAK 109 tidak hanya dalam satu tempat saja sehingga integrasi data sangat dibutuhkan, meskipun formatnya sudah ada namun data yang dibutuhkan belum 100% bisa terinput. Intinya Lazis Wahdah masih belum 100% bisa menerapkan PSAK 109 karena masih dalam tahap proses penyesuaian dengan format laporan keuangan sebelumnya.

Pengungkapan dalam akuntansi dapat dilakukan ketika suatu lembaga membuat laporan keuangan secara lengkap. Pengungkapan merupakan cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Pengungkapan laporan keuangan memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja suatu lembaga untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Dalam PSAK 109 telah dijelaskan beberapa komponen pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas melalui laporan keuangan yang disajikan.

Pengungkapan yang telah dilakukan oleh Lazis Wahdah belum disajikan dalam laporan keuangan, karena pada tahun 2017 belum adanya catatan atas laporan

keuangan yang dibuat. Sehingga informasi yang diperoleh sangat terbatas dan tidak terperinci. Berikut merupakan pengungkapan yang telah dilakukan Lazis Wahdah yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Bapak Saiful (Bendahara Umum Lazis Wahdah) pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) dibandingkan dengan pengungkapan PSAK 109.

Pengungkapan yang terdapat dalam PSAK 109 poin 39 (a) yakni, mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; Poin 39 (b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan; Poin 39 (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; poin 39 (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dana yang diterima langsung mustahik.

Dalam konteks pengukuran, kebijakan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan yang telah diterapkan Lazis Wahdah adalah skala prioritas penyaluran dana zakat ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik. Prioritas utama penyaluran dana zakat kepada empat asnaf yaitu fakir, miskin, fii sabilillah dan muallaf dengan persentase yang telah sesuai dengan syariah. Sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “bahwa skala prioritas diberikan kepada empat asnaf prioritas yaitu fakir, miskin, fii sabilillah, dan muallaf.”

Begitupun kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dana amil yang menjadi hak amil diberikan ujah sebesar 15% sedangkan untuk nonamil sesuai kesepakatan mitra. Sebagaimana

pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “Bagian ujah amil sebesar 15%, sedangkan untuk nonamil sesuai kesepakatan mitra.” Namun persentase tersebut saat ini belum ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan yang telah dibuat Lazis Wahdah saat ini tidak memiliki catatan atas laporan keuangan karena masih menggunakan model pencatatan dengan sistem single entry.

Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; Lazis Wahdah menggunakan metode sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) yaitu “zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : jumlah yang diterima, jika bentuk kas, dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset non-kas menggunakan harga pasar.”

Sementara itu, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik; rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan telah ditampilkan dalam laporan pertanggung jawaban dana zakat oleh Lazis Wahdah. Sedangkan jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahik dapat dilihat pada rekapitulasi penyaluran dana zakat, sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “yang pokok dalam asnaf zakat di Lazis Wahdah masuk dalam semua kategori program, misalnya : program dakwah; untuk asnaf muallaf, program tahfidz dan pendidikan; untuk anak yatim yang kurang mampu, program kemandirian; untuk asnaf miskin yang mau berusaha tapi kurang dalam hal skill dan modal, yang masing-masing disalurkan kepada mustahik sesuai dengan tujuan program tersebut.

Pengungkapan yang terdapat dalam poin 39 (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; praktik yang dilakukan pada Lazis Wahdah adalah sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “tidak ada penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan, sedangkan untuk metode penyaluran dana zakat, yang digunakan adalah model pemberdayaan berupa bantuan sosial.”

Pada poin 39 (f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi : (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; (iii) persentase dari setiap yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode tersebut. Lazis Wahdah dalam praktiknya sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiful pada tanggal 18 Desember 2018 (Pukul 14.00-15.00 WITA) “Lazis Wahdah masih menerima zakat individu dengan kelas zakat penghasilan, juga masih menerima zakat fitrah. Meski demikian ada juga yang pernah menyalurkan zakat peternakan. Dana yang diterima selain zakat dan infak/sedekah juga menerima dana wakaf, dana keummatan yang lain seperti; qurban, fidyah dan dana nonhalal. Adapun penyalurannya tidak menggunakan persentase tetapi melihat regulasi dari penerimaan yang masuk, sebab dalam penyalurannya sudah ditentukan penyaluran dana yang rutin dan insidental.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan Lazis Wahdah pada tahun 2017 tidak sesuai dengan PSAK 109 karena tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat

hal ini dapat dilihat dalam penyajian laporan keuangan Lazis Wahdah pada tahun 2017 yang masih menggunakan format dari BAZNAS yaitu sistem pencatatan single entry sehingga hanya menghasilkan tiga komponen laporan keuangan amil dan belum menghasilkan lima komponen laporan keuangan amil menurut PSAK 109.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyajian laporan keuangan Lazis Wahdah pada tahun 2017 masih menggunakan format dari BAZNAS yaitu sistem pencatatan single entry sehingga hanya menghasilkan tiga komponen laporan keuangan amil dan belum menghasilkan lima komponen laporan keuangan amil menurut PSAK 109. (2) Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan Lazis Wahdah pada tahun 2017 tidak sesuai dengan PSAK 109 karena tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan

pengembangan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dimasa mendatang: (1) Bagi Lazis Wahdah diharapkan senantiasa mengacu pada PSAK 109 dalam membuat komponen laporan keuangannya dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangannya agar informasi terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dapat memudahkan para muzakki atau donatur serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam memahami laporan keuangan. Kemudian mempublikasikan laporan keuangannya secara rutin pada media cetak ataupun media elektronik demi terjaganya akuntabilitas dana zakat dan menjaga kepercayaan para muzakki atau donatur. (2) Dalam penerapan PSAK 109 Lazis Wahdah juga diharapkan memiliki SDM yang kompatibel dan memahami PSAK 109 secara mendalam sehingga bisa menyesuaikan dalam proses penerapannya. (3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas terkait pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat secara profesional, transparan dan efektif serta proses sosialisasi Lembaga Zakat kepada *muzakki* atau masyarakat muslim agar sadar akan pentingnya kewajiban zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta:Quanta
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kuliitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyadi, Amri. 2015. *Permasalahan dalam Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109*.(online)(http://www.kompasiana.com/muhammad_amri_cahyadi/permasalahan-dalam-penerapan-akuntansi-zakat-psak-109_5581f04023afbd1a0ee10831)
- Departemen Agama RI. 2017. *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*. Bandung: PT. Cordoba Internasional-Indonesia.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani

- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Helmy, Masdar. 2001. *Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya*. Bandung: PT. Alma'arif Bandung
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta : IAI
- Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*, (Online), <http://dokumen.tips/documents/akuntansi-zakat.html>, diakses 17 April 2018)
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syari'ah, Teori & Praktik untuk Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2014 . *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Widodo, Hertanto. 2001. *Prinsip-prinsip Operasional Organisasi Pengelola Zakat*, (Online),(http://www.oocities.org/tarjikh/Artikel/prinsip_operasional_org_pengelola_zakat.htm), diakses 17 April 2018)
- Yasin, A.H. 2011. *Panduan Zakat Praktis The World of Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- www.laziswahdah.com